

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL  
BELI KELAPA SAWIT HITUNG TAKSIRAN BERAT  
BERDASARKAN UKURAN TANDAN**

**Skripsi**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (S.H.) dalam Hukum Ekonomi Syari'ah**

Oleh:

**EFI YULIANTI**

**NPM : 1621030068**

**Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H / 2020 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI  
KELAPA SAWIT HITUNG TAKSIRAN BERAT BERDASARKAN  
UKURAN TANDAN  
(Studi pada Koperasi Unit Desa Citra Sawit Mandiri Desa Sumber Deras  
Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir)**

**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

**EFI YULIANTI**

**NPM : 1621030068**

**Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)**

Pembimbing I : Dr. H. Bunyana Sholihin, M. Ag.

Pembimbing II : Khoiruddin, M.S.I.

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
TAHUN 1441 H / 2020 M**

## ABSTRAK

Jual beli kelapa sawit yang terjadi di Desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir dilakukan dengan memberikan taksiran berat terhadap ukuran tandan. Hitung tandan berarti jual beli dilakukan dengan menghitung jumlah tandan kelapa sawit yang berhasil dipanen dan diberikan taksiran berat dan ukuran untuk pemberian harga, tidak melalui penimbangan terlebih dahulu. Tandan yang memiliki berat 25 kg bisa dihargai sama dengan tandan yang memiliki berat 20 kg karena hanya digolongkan berdasar perkiraan ukuran. Sehingga menimbulkan ketidakjelasan atas timbangan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli kelapa sawit hitung taksiran berat terhadap ukuran tandan pada Koperasi Unit Desa Citra Sawit Mandiri Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli praktik jual beli kelapa sawit hitung taksiran berat terhadap ukuran tandan pada Koperasi Unit Desa Citra Sawit Mandiri Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan pada Koperasi Unit Desa Citra Sawit Mandiri Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering dan didukung dengan *library research* (penelitian pustaka). Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Pengolahan data yang diterapkan adalah dengan cara kualitatif. Analisa masalah dilakukan secara *deskriptif* kualitatif dengan pendekatan induktif.

Hasil penelitian bahwa jual beli kelapa sawit dilakukan dengan cara hitung tandan di Desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan jual beli yang terjadi antara pemilik kebun kelapa sawit dengan KUD dan kemudian KUD menyetorkan kelapa sawit ke sebuah PT atau perusahaan, yakni PT. Sampoerna Agro Tbk. Pemilik kebun mewakilkan pengelolaan dan pemanenan kebun kelapa sawitnya kepada KUD sampai proses pembayaran atau penerimaan gaji tiap bulannya yang akan diterima pemilik kebun. Penetapan harga murni dilakukan oleh KUD pada kelapa sawit yang telah dipanen dengan memperkirakan besar dan jumlah tandan yang dihasilkan. Dilihat dari hukum Islam praktik jual beli kelapa sawit hitung tandan ini masih terdapat kesamaran atau ketidakjelasan dalam segi objek atau barang yang diperjualbelikan dalam hal ukuran dan timbangan, dan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang terkait dalam jual beli. Dalam hal ini yang dirugikan adalah penjual karena mereka tidak mengetahui pasti berapa banyak hasil panen mereka, namun hanya mengetahui jumlah tandan kelapa sawit yang berhasil dipanen dengan ukuran yang hanya diberikan taksiran atau perkiraan ukurannya oleh pihak KUD. Maka dalam hukum Islam jual beli ini adalah haram, karena praktik jual belinya mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan timbangan) baik penjual maupun pembeli.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EFI YULIANTI  
NPM : 1621030068  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Hitung Taksiran Berat Berdasarkan Ukuran Tandan (Studi pada Koperasi Unit Desa Citra Sawit Mandiri Desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 10 Juni 2020  
Penulis,

Efi Yulianti  
NPM: 1621030068





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721)703260

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi, saudara;

Nama : EFI YULIANTI

NPM : 1621030068

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Fakultas : SYARI'AH

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KELAPA SAWIT HITUNG TAKSIRAN BERAT BERDASARKAN UKURAN TANDAN (Studi pada Koperasi Unit Desa Citra Sawit Mandiri Desa Sumber Deras, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir)

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, April 2020

Pembimbing I,

Dr. H. Bunvana Sholihin, M.Ag.  
NIP. 195707051989031001

Pembimbing II,

Khoiruddin, M.S.I.  
NIP. 197807252009121002

Ketua Jurusan Muamalah,

Khoiruddin, M. S. I.  
NIP. 197807252009121002





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721)703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Hitung Taksiran Berat Berdasarkan Ukuran Tandan (Studi pada Koperasi Unit Desa Citra Sawit Mandiri Desa Sumber Deras, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir)** Disusun oleh: **Efi Yulianti, NPM: 1621030068, Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)**, telah diajukan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin, 29 Juni 2020.**

**DEWAN PENGUJI**

**Ketua Sidang : Marwin, S.H., M.H.**

(.....)

**Sekretaris Sidang : Juhrotul Khulwah, M.S.I.**

(.....)

**Penguji I : Drs. Susiadi AS., M. Sos.I.**

(.....)

**Penguji II : Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag.**

(.....)

**Penguji III : Khoiruddin, M.S.I.**

(.....)

**Dekan  
Fakultas Syari'ah**



**Dr. H. Khoiruddin, M.H.**  
**NPM. 196210221993031002**

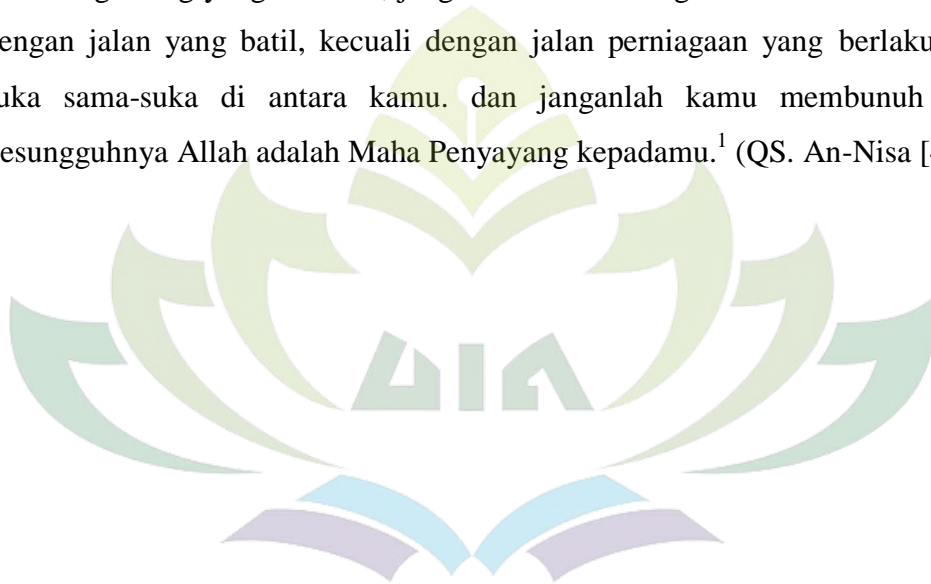


## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>1</sup> (QS. An-Nisa [4]: 29)



---

<sup>1</sup> QS An-Nisa [4]: 29.

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah puji syukur kusembahkan kepadaMu Ya Allah, atas hidayah, rahmat, dan kuasa-Mu, skripsi ini terselesaikan dan kupersembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang, dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Mamakku tersayang, Priyati dan Bapakku tersayang, Noto, yang paling hebat, terima kasih atas segala limpahan kasih sayang, doa, serta dukungan baik secara moril dan materil yang selama ini selalu diberikan tak terhingga. Semoga kelak anakmu ini dapat membanggakan kalian dan menjadi manusia yang bermanfaat di dunia maupun akhirat.
2. Terima kasih selanjutnya untuk Kakak lelaki ku satu-satunya yang paling kusayangi, Ahmad Sanusi dan kakak Iparku Karina Indriana yang selama ini selalu memberikan doa dan dukungan serta menjadi tempat bersandar yang menguatkan ku saat tidak bisa mengeluh kepada orang tua.
3. Seluruh keluarga besar alm. Mbah Kasian dan Wakinah yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta menanti kapan skripsi ini selesai.
4. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tercinta.



## **RIWAYAT HIDUP**

Efi Yulianti, dilahirkan di Desa Dayamurni, pada 13 Juni 1998, anak kedua dari pasangan Noto dan Priyati. Pendidikan dasar dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 01 Dayamurni dan selesai pada tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tumijajar selesai pada tahun 2013, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tumijajar selesai pada 2016 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 2016/2017.

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intrakampus maupun ekstrakampus di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 15 April 2020  
Yang Membuat,

Efi Yulianti  
NPM 1621030068

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT. karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terurah kepada Nabi Muhammad SAW. Kepada keluarganya, sahabatnya, hingga kepada kita para umatnya. Aamiin.

Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) di UIN Raden Intan Lampung dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Hitung Taksiran Berat Berdasarkan Ukuran Tandan** (Studi pada Koperasi Unit Desa Citra Sawit Mandiri Desa Sumber Deras, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir)”

Dalam menyusun dan menulis skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan senang hati menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
2. Khoiruddin, M.S.I. dan Juhrotul Khulwah, M.S.I. selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah).



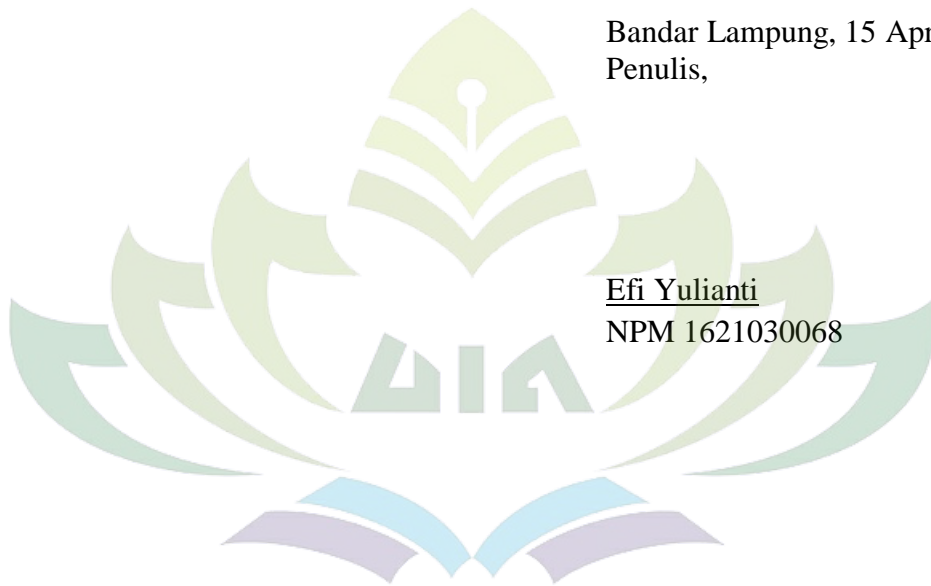
3. Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Khoiruddin, M.S.I. selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
4. Seluruh dosen yang pernah mengajar dan memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah yang telah membantu berupa buku-buku referensi untuk penulisan skripsi.
6. Pengurus KUD Citra Sawit Mandiri dan anggota KUD Citra Sawit Mandiri yang telah membantu dalam melaksanakan penelitian skripsi.
7. Keluarga Cendana yang paling ku sayangi, Hayyu Mashvufah, Ikram Mawar Sari, Azizatun Nurrohmah, Dewi Lestari, Siti Komariyah, dan Luthvia Rohmaini, serta Evan Supriyadi atas segala dukungan, motivasi, kebersamaan, dan suka duka, serta kenangan dari awal perkuliahku sampai sekarang.
8. Muhammad Dimas Ismail yang membantu membuat proses penyusunan skripsi ini menjadi skripsweet.
9. Teman seperjuangan kuliah, Khoirunnisa, Linda Ayu Nurjanah, dan Sofia Nuraini atas kebersamaan dan dukungannya selama ini.
10. Teman-teman seperjuangan Muamalah B atas kebersamaannya selama ini.
11. Teman-teman KKN 237 Desa Datar Lebuay, PPS Pengadilan Agama Tanjung Karang yang telah membantu melancarkan proses untuk tercapainya tahap penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu dan dana yang dimiliki. Untuk itu kirannya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi tulisan ini.

Akhirnya, diharapkan betapa pun (skripsi) ini dapat menjadi sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).

Bandar Lampung, 15 April 2020  
Penulis,

Efi Yulianti  
NPM 1621030068





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penjelasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
E. Fokus Penelitian .....	8
F. Rumusan Masalah.....	8
G. Tujuan Penelitian .....	8
H. Signifikansi Penelitian .....	9
I. Metode Penelitian .....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Kajian Teori .....	15
1. Pengertian Jual Beli dan Dasar Hukum Jual Beli .....	15
2. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	18
3. Macam-Macam Jual Beli .....	24
4. Jual Beli yang Dilarang .....	28
5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli .....	36
6. Kaidah Fiqh Mua'alah .....	37
6. Prinsip-Prinsip dalam Berbisnis .....	38
B. Kajian Pustaka .....	47

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Objek .....	50
1. Sejarah Berdirinya Koperasi Unit Desa Citra Sawit Mandiri..	50
2. Peran Koperasi Unit Desa Citra Sawit Mandiri di Desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Induk, Kabupaten Ogan Komerling Ilir .....	57
B. Praktik Jual Beli Kelapa Sawit pada Koperasi Unit Desa Citra Sawit Mandiri Desa Sumber Deras, Kecamatan Mesuji Induk, Kabupaten Ogan Komerling Ilir.....	59

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Jual Beli Kelapa Sawit Hitung Taksiran Berat Berdasarkan Ukuran Tandan yang Dilakukan pada Koperasi Unit Desa Citra Sawit Mandiri Desa Sumber Deras, Kecamatan Mesuji Induk, Kabupaten Ogan Komerling Ilir .....	61
B. Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Hitung Taksiran Berat Berdasarkan Ukuran Tandan pada Koperasi Unit Desa Citra Sawit Mandiri Desa Sumber Deras, Kecamatan Mesuji Induk, Kabupaten Ogan Komerling Ilir .....	69

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	75
B. Rekomendasi .....	76

### **DAFTAR PUSTAKA ..... 78**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN ..... 81**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Untuk lebih memberikan spesifikasi pemahaman agar tidak keluar atau melebar dari pembahasan yang dituju dan guna menghindari terjadinya penafsiran yang berbeda atau bahkan kesalahpahaman dari pembaca maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai penjelasan judul dengan memberikan arti terhadap beberapa penggalan istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Hitung Tandan”.

Adapun beberapa istilah yang terkandung di dalam judul dan akan diuraikan secara sistematis sebagai berikut:

#### **1. Tinjauan Hukum Islam**

##### **a. Tinjauan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tinjauan diartikan sebagai hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>1</sup>

##### **b. Hukum Islam**

Hukum Islam adalah *Khitab* (kalam) Allah yang mengatur perbuatan orang yang *mukalaf*, baik berupa *Iqtidla* (perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*” (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470.

meninggalkan), *Takhyir* (kebolehan bagi orang *mukalaf* untuk memilih antara melakukan dan tidak melakukan), atau *Wadl* (ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau *mani'* [penghalang]).<sup>2</sup>

Jadi, yang dimaksud dengan tinjauan hukum Islam adalah suatu pandangan atau pendapat yang didasarkan pada aturan-aturan seperti ayat hukum dalam Al-Quran, atau secara tidak langsung pada hadis-hadis hukum dalam Sunnah Rasulullah yang mengatur amal perbuatan manusia.

## 2. Praktik Jual Beli Kelapa Sawit dengan Hitung Tandan

### a. Praktik

Praktik berarti melaksanakan apa yang ada dan disebutkan dalam teori.<sup>3</sup>

### b. Jual Beli

Menurut etimologi (bahasa), jual beli merupakan pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Kata lain dari *Ba'i* (jual beli) adalah *al-tijarah* artinya perdagangan.<sup>4</sup> Sedangkan menurut istilah (terminologi) yang dimaksud jual beli ialah kegiatan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada lainnya berdasar pada kerelaan.<sup>5</sup>

<sup>2</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 36.

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*", h. 1098.

<sup>4</sup> A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, (Bandar Lampung: Pematnet, 2016), h. 103.

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2016), h. 67.



c. Kelapa Sawit

Kelapa sawit adalah pohon yang menyerupai kelapa, bunganya berupa tandan bercabang dengan buah kecil-kecil dan banyak, ciri buah berwarna merah kehitam-hitaman, daging dan kulit buahnya mengandung minyak, digunakan sebagai bahan pembuat minyak, mentega, atau sabun.<sup>6</sup>

d. Hitung Tandan

Tandan berarti tangkai yang panjang pada buah-buahan yang bergugus.<sup>7</sup> Contoh paling umum lainnya dari tumbuhan yang buahnya bertandan adalah pisang. Hitung tandan berarti kelapa sawit dijual berdasarkan berapa jumlah tandan kelapa sawit yang berhasil diperoleh pada saat panen.

Jadi, maksud dari tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli kelapa sawit hitung tandan adalah pandangan menurut aturan Islam tentang praktik jual beli atau perdagangan kelapa sawit dengan cara hitung tangkai panjang buah (tandan) tanpa penimbangan berat kelapa sawit.

## B. Alasan Memilih Judul

Alasan penulis memilih judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Hitung Tandan” adalah dengan mempertimbangkan alasan objektif dan alasan subjektif sebagai berikut

---

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*”, h. 1394.

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 652.

## 1. Alasan Objektif

Problematika yang terdapat dalam jual beli dengan dihitung tandan tanpa adanya penimbangan berat kelapa sawit membuat ketidakjelasan sehingga permasalahan ini perlu dikaji bagaimana pandangan dalam hukum Islam.

## 2. Alasan Subjektif

- a. Judul skripsi ini pembahasannya sangat sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis tekuni dan penulis merasa perlu mengadakan penelitian lebih lanjut tentang praktik jual beli kelapa sawit.
- b. Dari aspek pembahasan, judul tersebut sangat memungkinkan untuk mengadakan penelitian serta didukung tersedianya data-data yang dibutuhkan sehingga diharapkan penelitian dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

## C. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan kelapa sawit di Desa Sumber Deras, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir dilakukan oleh Koperasi Unit Desa (KUD). KUD melakukan segala pengelolaan perkebunan, termasuk dalam hal pemeliharaan kebun dan pemanenan. Fungsi KUD di Desa Sumber Deras, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah melakukan pengelolaan kebun kelapa sawit yang dimiliki oleh warga sehingga dalam pengelolaannya terpusat dalam satu lembaga dan nantinya dari KUD inilah yang akan menyetorkan hasil panen kepada pabrik atau pelapak.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Zaitun, wawancara dengan penulis, rekaman kaset, Bandar Lampung, 06 Mei 2019.

KUD membeli kelapa sawit hasil panen dari kebun dengan sistem hitung tandan lalu setelah itu dijual kembali kepada pabrik atau pelapak dengan hitungan perkilo. Harga yang diberikan oleh koperasi dihitung dengan memberikan taksiran atau perkiraan berat. Tandan yang memiliki berat 25 kg bisa dihargai sama dengan tandan yang memiliki berat 20 kg. Pemilik lahan kelapa sawit tidak tahu berapa banyak hasil panen mereka. mereka hanya diberi catatan penjualan berupa berapa tandan yang diperoleh dan harga yang diberikan pertandan lalu dikurangi biaya perawatan dan pemanenan oleh koperasi.<sup>9</sup>

Pengelolaan dan pemanenan kelapa sawit yang dilakukan oleh koperasi ini sudah berlangsung sejak lama. Para pemilik kebun menyerahkan dan mewakilkan pengelolaan dan penjualan kelapa sawit mereka kepada Koperasi Unit Desa sehingga nantinya dari KUD itulah yang akan menyetorkan kelapa sawit dari kebun kepada perusahaan penampung. Koperasi menjadi penentu harga penjualan kelapa sawit untuk para pemilik kebun atau petani.<sup>10</sup>

Jual beli atau perdagangan secara bahasa berarti *al-Bai'*, *al Tijarah*, dan *al-Mubadalah*,<sup>11</sup> seperti Firman Allah:

...يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ .

“...Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.”  
(QS. Fathir [35]: 29).

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 67.



Sedangkan secara istilah, jual beli berarti kegiatan tukar-menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan berpindahnya hak kepemilikan dengan disertai unsur kerelaan antarkedua belah pihak.<sup>12</sup> Tujuan dilaksanakannya jual beli adalah untuk memperoleh keuntungan antarkedua belah pihak, maka diperlukan kerelaan masing-masing pihak baik dari penjual maupun pembeli sehingga dapat terpenuhinya hajat hidup orang banyak.<sup>13</sup> Dalam rangka memenuhi tujuan dari jual beli, maka dalam pelaksanaannya sendiri juga harus memenuhi syarat dan rukun jual beli, supaya pada akhirnya tidak akan ada yang merasa dirugikan karena hak-haknya telah terjaga oleh terpenuhinya syarat dan rukun jual beli.<sup>14</sup>

Salah satu pedoman bisnis menurut Ibnu Taymiyyah dalam kitab Al Hisbah adalah, sempurna dalam timbangan.<sup>15</sup> *“Kecelakaanlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain ia minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”*(QS.Al-Muthaffifin:1-3). Pelaksanaan akad dalam transaksi perdagangan diharuskan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkan ‘*antarâdhin minkum*’. Walaupun kerelaan tersebut merupakan sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat.<sup>16</sup> Dalam bidang muamalah, khususnya

---

<sup>12</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 45.

<sup>13</sup> A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, h. 122.

<sup>14</sup> Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2016), h. 36.

<sup>15</sup> Sri Nawatmi, “Etika Bisnis dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Fokus Ekonomi :Jurnal Ilmiah Ekonomi* Vol. 9 No. 1 (April, 2010), h. 54.

<sup>16</sup> Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani, “Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia”, *Jurnal Al-Adalah* Vol. 12 No. 4 (Desember, 2015), h. 786.

masalah perekonomian, Islam juga sangat memperhatikan unsur etika dalam pelaksanaannya. Islam melarang unsur eksploitasi dan transaksi-transaksi yang belum jelas bentuknya maupun jumlahnya, yaitu *gharar*.<sup>17</sup>

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بَا لِبَا طِلٍ وَتُذْ لُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِإِلَافٍ لَّيْسَ بِكُمْ تَعْلَمُونَ

*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah [2]: 188).*

Dalam menjalankan kegiatan ekonomi atau berbisnis, Islam juga telah memberikan etika dalam menjalankannya dan terdapat beberapa prinsip yang salah satunya adalah prinsip keadilan atau keseimbangan. Keadilan yang ditunjukkan oleh Islam adalah keadilan yang bersifat mutlak dan sempurna, bukan bersifat relatif.<sup>18</sup>

Berdasarkan hal di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut melalui karya ilmiah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Kelapa Sawit Hitung Tandan” dengan studi pada Koperasi Unit Desa Citra Sawit Mandiri, Desa Sumber Deras, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir.

<sup>17</sup> Efa Rodiah Nur, “Riba dan *Gharar*: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern”, *Jurnal Al-Adalah* Vol. 12 No. 3 (Juni, 2015), h. 648.

<sup>18</sup> Khoiruddin, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2015), h. 56.

**D. Fokus Penelitian**

Penelitian ini akan difokuskan pada praktik jual beli kelapa sawit dengan hitung tandan serta bagaimana pandangan dalam hukum Islamnya.

**E. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik jual beli kelapa sawit hitung tandan pada Koperasi Unit Desa Citra Sawit Mandiri Desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kelapa sawit hitung tandan pada Koperasi Unit Desa Citra Sawit Mandiri Desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir?

**F. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan praktik jual beli kelapa sawit dengan hitung tandan pada Koperasi Unit Desa Citra Sawit Mandiri Desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Untuk mengetahui dan menerangkan tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli kelapa sawit dengan hitung tandan pada Koperasi Unit Desa Citra Sawit Mandiri Desa Sumber Deras, Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir.



## G. Signifikansi Penelitian

Signifikansi atau manfaat yang diharapkan dari adanya hasil penelitian ini adalah:

### 1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai praktik jual beli kelapa sawit dengan hitung tandan dalam perspektif hukum Islam.

### 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dilakukan untuk tujuan menjadi salah satu tugas akhir guna terpenuhinya syarat untuk memperoleh gelar S.H. dari Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu suatu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan, seperti di lingkungan masyarakat.<sup>19</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian dilakukan dengan mengumpulkan informasi mengenai gejala yang ada tanpa bermaksud untuk membuat suatu kesimpulan secara umum, dan nantinya akan dijabarkan dengan pemaparan (deskripsi) data-data serta tidak

---

<sup>19</sup> Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 4.

dimaksudkan untuk membuat suatu kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>20</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif memiliki karakteristik khusus yakni data dikumpulkan hingga disajikan secara deskriptif, yakni lebih menggunakan penjabaran kata-kata daripada angka.<sup>21</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung didapatkan dari lapangan.<sup>22</sup> Data primer bersumber dari hasil wawancara dengan petugas koperasi Citra Sawit Mandiri dan pemilik kebun kelapa sawit di Desa Sumber Deras, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan langsung dari sumber kepustakaan.<sup>23</sup> Data sekunder bersumber dari buku-buku dan jurnal yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan yang akan ditelaah dalam penelitian ini.

<sup>20</sup> Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2018), h. 88.

<sup>21</sup> Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2014), h. 3.

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 225.

<sup>23</sup> *Ibid.*

#### 4. Tempat Penelitian

Penelitian akan dilakukan pada Koperasi Unit Desa Citra Sawit Mandiri Desa Sumber Deras, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir.

##### a. Populasi

Populasi adalah jumlah penghuni yang mendiami suatu ruang tertentu yang terdiri objek maupun subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas khusus sehingga dapat dijadikan sumber pengambilan sampel.<sup>24</sup> Populasi pada penelitian ini berjumlah 200 orang, terdiri dari 3 orang pengurus inti dan 167 anggota KUD Citra Sawit Mandiri.

##### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari subjek atau objek yang terdapat dalam populasi. Apabila populasi ada dalam jumlah besar maka tidak mungkin akan diteliti seluruh populasi, melainkan akan diambil sampel yang dapat merepresentatifkan (mewakili) populasi tersebut.<sup>25</sup>

Sebagaimana yang dikatakan oleh Suharsimi Arikunto, jika populasi dalam penelitian kurang dari 100 orang maka lebih baik jika diambil atau diteliti semuanya, tetapi jika populasinya lebih

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 80.

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 81.

besar atau berjumlah banyak, maka dapat diambil sampel sebanyak 10-15% atau 20-25% atau lebih.<sup>26</sup>

Karena populasi dalam penelitian ini berjumlah lebih dari 100 orang, maka sampel yang diambil 10% dari populasi. Maka sampel dalam penelitian ini berjumlah 20 orang ( $10\% \times 200 = 20$ ), terdiri dari 3 orang pengurus KUD dan 17 orang anggota KUD. Karena tidak semua populasi dijadikan sampel maka penelitian ini adalah penelitian sampel.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif secara umum mencakup observasi, wawancara, dan analisis dokumen.<sup>27</sup>

### a. Observasi

Observasi adalah suatu peninjauan yang dilakukan secara cermat yang tujuannya adalah untuk mengetahui dan memahami tingkah laku suatu lingkungan secara langsung.<sup>28</sup>

### b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *interview* adalah interaksi bahasa yang terjadi antara dua pihak dimana salah satu pihak menjadi narasumber dan pihak lainnya menjadi pewawancara dengan harapan terjadinya aliran informasi dari narasumber kepada pewawancara.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 112.

<sup>27</sup> Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, h. 17.

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 81.

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 138.



c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.<sup>30</sup> Dokumen adalah surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan.<sup>31</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini adalah laporan harga kelapa sawit pada KUD Citra Sawit Mandiri.

## 6. Pengolahan Data

Setelah keseluruhan data terkumpul maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.<sup>32</sup>
- b. Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.<sup>33</sup>
- c. Sistematisasi data (*Sistematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>34</sup>

---

<sup>30</sup> Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, h. 84.

<sup>31</sup> Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*" h. 460.

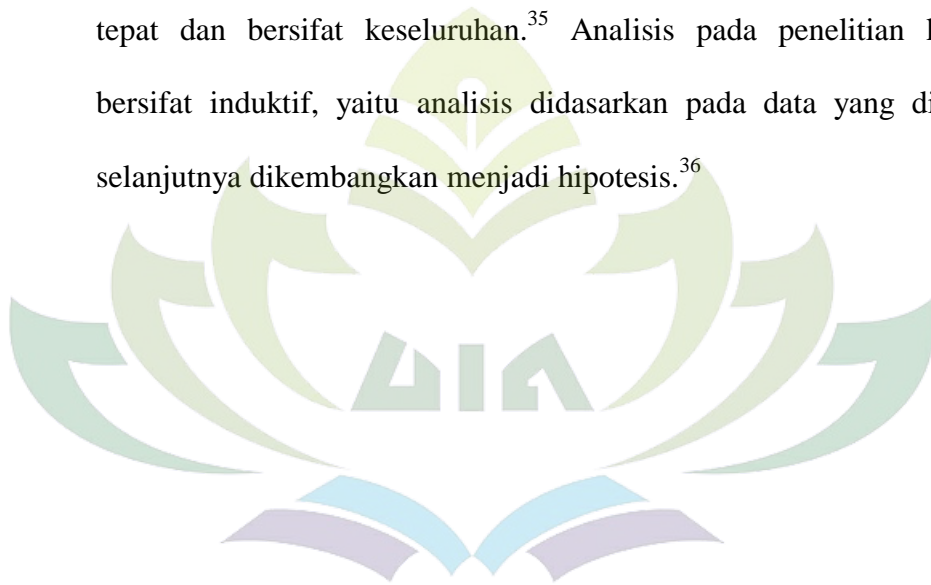
<sup>32</sup> Muhammad Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 55.

<sup>33</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2006), h. 107.

<sup>34</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 126.

## 7. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam sehingga akan mengakibatkan variasi data yang sangat tinggi dan beragam. Analisis data adalah proses mencari, mengurai, dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, maupun catatan lapangan untuk memperoleh pemahaman arti secara tepat dan bersifat keseluruhan.<sup>35</sup> Analisis pada penelitian kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis didasarkan pada data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.<sup>36</sup>



---

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 244.

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 245.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

###### a. Pengertian Jual Beli

Menurut bahasa, jual beli dapat diartikan *al-mubadalah* (saling tukar menukar/barter).<sup>1</sup> Jual beli atau perdagangan secara etimologi juga berarti *al-Bai'* dan *al-Tijarah*.<sup>2</sup> Sebagaimana Allah SWT. berfirman: QS Fathir: 29.

...يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ .

“...Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.”  
(QS. Fathir [35]:29)

Sedangkan pengertian jual beli menurut istilah adalah terminologi dalam fiqh mengenal *al-ba'i* untuk penyebutan jual beli yang berarti mengganti, menjual, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Lafal *al-ba'i* terkadang juga dipakai untuk mengartikan lawannya, yaitu lafal *al-Syira* yang berarti membeli. sehingga, *al-ba'i* mengandung arti menjual juga membeli atau jual beli.<sup>3</sup>

Terdapat beberapa definisi lain dari jual beli yaitu sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bairut: Da Al-Fikr. 1403 H/1983 M, Jilid 3), h. 126, dikutip oleh Mardani. “Sistem Hukum Ekonomi Islam” (Jakarta: RajaGrafindo, 2015), h. 167.

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2016), h. 67.

<sup>3</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2015), h. 101.

- 1) Hanafiah memberikan pengertian secara pasti (definitif) mengenai jual beli (*al-bay*) yaitu kegiatan tukar menukar harta benda atau suatu barang yang dikehendaki dengan sesuatu yang bernilai sama atau setara dengan jalan yang tidak saling merugikan.<sup>4</sup>
- 2) Menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, mengartikan jual beli (*al-ba'i*) adalah tukar-menukar harta dengan sesama harta disertai dengan pemindahan kepemilikan dan hak milik dari harta tersebut.<sup>5</sup>
- 3) Menurut Sayid Sabiq, jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka (*an-taradhin*). Pemindahkan kepemilikan disertai dengan adanya pergantian, dengan prinsip yang diperbolehkan atau tidak melanggar syari'ah.<sup>6</sup>
- 4) Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.<sup>7</sup>

#### b. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum diperbolehkannya jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 275.

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bairut: Da Al-Fikr. 1403 H/1983 M, Jilid 3), h. 126, dikutip oleh Mardani. "Sistem Hukum Ekonomi Islam" (Jakarta: RajaGrafindo, 2015), h. 167.

<sup>7</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Pasal 20 ayat (2).



“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS Al-Baqarah [2]: 275).

2) Firman Allah dalam QS. An-Nisa (4): 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا  
بِجَارَةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa [4]: 29)

3) Hadis Nabi SAW.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا بَاعَ الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)<sup>8</sup>

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”. (HR. Al- Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

4) Hadis Nabi SAW.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزْزَارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Diriwayatkan oleh Ibnu Majah II/737 no: 2185.

<sup>9</sup> HR Bazzar no. 3731 dan dinilai shahih oleh al-Hakim

Dari Rifa'ah bin Rafi', Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, "Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur" [HR Bazzar no. 3731 dan dinilai shahih oleh al-Hakim]

- 5) Secara Ijma', para ulama juga sepakat bahwa jual beli itu hukumnya halal. Manusia sebagai makhluk sosial memang ditakdirkan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, tanpa bantuan orang lain.<sup>10</sup> Manusia membutuhkan manusia lainnya untuk dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya maupun untuk melangsungkan kehidupannya. Kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan tidak dapat dipenuhinya sendiri. Saling membutuhkan antarmanusia itu harus menimbulkan efek timbal balik yang seimbang atau sepadan agar tidak saling merugikan, baik diganti dengan barang lainnya atau sesuatu hal lain yang sesuai.<sup>11</sup> Merujuk pada ayat-ayat Al Qur'an serta Hadis, maka hukum awal dari jual beli adalah boleh (mubah). Akan tetapi, pada kondisi dan situasi tertentu, hukum yang awalnya mubah tadi dapat berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, bahkan haram.<sup>12</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat beberapa rukun (unsur) yang harus dipenuhi, yaitu:

---

<sup>10</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 75.

<sup>11</sup> Siti Khasinah, "Hakikat Manusia Menurut Pandangan Islam dan Barat", *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA*, Vol. 13 No. 2 (Februari, 2013), h. 303.

<sup>12</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 114.

a. Para pihak yang terkait;

Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan jual beli yaitu: penjual, pembeli, dan pihak lainnya apabila diperlukan dalam perjanjian tersebut.<sup>13</sup>

- 1) Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah orang cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*).<sup>14</sup>
- 2) Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).<sup>15</sup>

Sebagai yang melakukan jual beli (subjek jual beli) yakni penjual dan pembeli, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Berakal, yaitu dapat membedakan dan memilih mana yang baik dan buruk bagi dirinya. Maka dari itu, apabila salah satu subjek jual beli tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah.<sup>16</sup>
- b) Dengan kehendak sendiri (tidak dipaksa), artinya ketika transaksi jual beli dilakukan, tidak diperbolehkan salah satu pihak melakukan tekanan atau memaksa pihak lainnya. Kedua pihak harus berdasar pada keinginan dan

<sup>13</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 56.

<sup>14</sup> A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), h. 104.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 105.

kehendaknya sendiri. Barulah jual beli yang dilakukan bisa sah. Apabila dilakukan di bawah tekanan maka jual beli tersebut tidak sah.<sup>17</sup>

c) Keduanya tidak mubazir, maksudnya adalah para pihak yang terlibat dan melakukan transaksi jual beli bukan termasuk orang-orang yang boros (mubazir), karena orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya ia tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum meskipun hal tersebut hanya menyangkut kepentingannya sendiri.<sup>18</sup>

d) *Baligh* yang menurut hukum Islam (*fiqih*), seseorang yang dikatakan *baligh* atau dewasa apabila sudah menginjak berusia 15 tahun untuk anak laki-laki dan sudah datang bulan (*haid*) untuk anak perempuan.<sup>19</sup> Firman Allah:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا....

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan” (QS An-Nisa [4]: 5).

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 106.

<sup>19</sup> *Ibid.*



b. Objek;

Objek jual beli terdiri dari benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar.<sup>20</sup>

Barang (objek) yang diperjual belikan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Suci atau bersih barangnya, maksudnya bahwa barang yang diperjual belikan bukanlah barang atau benda yang digolongkan sebagai barang atau benda yang najis atau diharamkan.<sup>21</sup>
- 2) Barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan, maksud barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, karena pada dasarnya semua barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi, misalnya beras, kue, ikan, buah-buahan, dan lain sebagainya, dinikmati keindahannya seperti lukisan dan kaligrafi. Dinikmati suaranya seperti radio, TV, dan kaset. Dengan demikian yang dimaksud dengan barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan adalah bahwa kemanfaatan barang tersebut dengan ketentuan hukum agama (syariat Islam) atau pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama yang berlaku.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Pasal 58.

<sup>21</sup> A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, h. 107.

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 108.

- 3) Barang atau benda yang diperjual belikan adalah milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal.<sup>23</sup>
- 4) Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan.<sup>24</sup>
- 5) Barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diketahui, maksudnya objek yang diperjualbelikan dapat diketahui dari segi banyaknya, beratnya, kualitasnya, maupun ukuran-ukuran lainnya. sehingga tidak sah jual beli yang mengakibatkan keraguan pihak yang bertransaksi atau jual belinya mengandung penipuan.<sup>25</sup>

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَبُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَانُوا  
هُمُ الْوَارِثُونَ يَتْلَوْهُمُ يُمْسِرُونَ .

“Celakah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.” (QS Al-Muthaffifin [83]: 1-3).

- 6) Barang atau benda yang diperjual belikan tidak boleh digantungkan pada suatu kondisi, artinya objek yang diperjual belikan tidak boleh dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 109.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 110.

lain, contohnya seperti: jika ayahku pergi, maka akan aku jual motor ini kepadamu.<sup>26</sup>

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat objek yang diperjualbelikan adalah:<sup>27</sup>

- 1) Barang yang diperjualbelikan harus sudah ada.
- 2) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan.
- 3) Barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
- 4) Barang yang diperjualbelikan harus halal.
- 5) Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
- 6) Kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui.
- 7) Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli.
- 8) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- 9) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti waktu akad.

#### c. Kesepakatan atau Ijab Qabul

Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.<sup>28</sup> Lafaz jual beli yaitu suatu pernyataan atau perkataan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagai gambaran atas hendak untuk

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Pasal 76.

<sup>28</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Pasal 60.

melakukan transaksi jual beli.<sup>29</sup> Ketika terjadi perubahan harga yang juga mengakibatkan perubahan akad, maka adalah akad terakhir yang dinyatakan berlaku.<sup>30</sup>

Dalam ijab qabul jual beli ada syarat-syarat yang harus diperhatikan, antara lain:<sup>31</sup>

- 1) Tidak ada yang membatasi antara penjual dan pembeli, maksudnya adalah janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijabnya, pembeli harus memberikan respon balik atas penjual, begitu juga sebaliknya.
- 2) Antara ijab dan qabul, janganlah diselangi dengan kata-kata lain yang tidak berhubungan dengan transaksi saat itu.
- 3) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul.
- 4) Ijab dan qabul harus jelas dan lengkap, artinya bahwa pernyataan ijab dan qabul harus jelas, lengkap, dan pasti, serta tidak menimbulkan pemahaman lain.
- 5) Ijab dan qabul harus dapat diterima oleh kedua belah pihak dengan suka sama suka.

### 3. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum

---

<sup>29</sup> A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, h. 110.

<sup>30</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Pasal 61.

<sup>31</sup> A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, h. 110-111.

dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli, dan segi pelaku jual beli.<sup>32</sup>

a. Ditinjau dari Segi Hukum

1) Jual beli sah menurut hukum

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah menurut hukum apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan; objeknya milik sendiri bukan milik orang lain, tidak lagi tergantung pada hak khiyar. Jual beli yang seperti ini dikatakan jual beli *shahih*. Misalnya, seseorang membeli motor. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, motor telah diperiksa oleh calon pembeli dan tidak terdapat cacat maupun kerusakan, tidak terjadi manipulasi harga, dan motor itupun telah diserahkan, serta tidak ada hak *khiyar* lagi dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini hukumnya sah dan mengikat bagi kedua belah pihak.<sup>33</sup>

2) Jual beli batal menurut hukum

Jual beli yang dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila terdapat rukun yang tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak yang belum *baligh*, orang gila, atau barang

---

<sup>32</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 75.

<sup>33</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, h. 171.



yang diperjualbelikan adalah barang-barang yang secara syariat memang diharamkan, seperti darah, bangkai, khamar, dan babi.<sup>34</sup>

b. Ditinjau dari segi objek jual beli

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin, sebagaimana dikutip oleh Hendi Suhendi.<sup>35</sup> Bahwa objek jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:

الْبَيْعُ ثَلَاثَةٌ بَيْعٌ عَيْنٍ مُّشَاهِدَةً وَبَيْعٌ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ وَبَيْعٌ عَيْنٍ غَائِبَةٍ لَمْ تُشَاهَدْ

“Jual beli itu ada tiga macam: 1) jual beli benda yang kelihatan, 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) jual beli benda yang tidak ada.”

- 1) Jual beli benda yang kelihatan, ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.<sup>36</sup>
- 2) Jual beli yang telah disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian sebelumnya, yaitu jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah untuk jual beli yang kontan, *salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 75, mengutip *Kifayat al-Akhyar*, h. 329.

<sup>36</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 76.

perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.<sup>37</sup>

- 3) Jual beli yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari jalan yang tidak halal misalnya berasal dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.<sup>38</sup>

c. Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek)

Subjek jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan.

- 1) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan cara komunikasi pembawaan alami dalam menampakkan kehendak orang yang bersangkutan. Hal yang dipandang penting dalam akad adalah maksud atau kehendak dan tujuan, bukan pembicaraan dan pernyataan.<sup>39</sup>
- 2) Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan, misalnya via Pos dan Giro. Jual beli ini dilakukan

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 76-77.

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 77.

antara penjual dan pembeli yang tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui Pos dan Giro, jual beli seperti diperbolehkan menurut *syara'*. Dalam pemahanam sebagian ulama, bentuk ini mirip dengan bentuk jual beli *salam*.<sup>40</sup>

- 3) Jual beli yang langsung dengan perbuatan (saling memberikan) tanpa saling berbicara atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, lalu memberikan uang seharga rokok tersebut kepada penjual. Jual beli seperti ini dilakukan tanpa sighat ijab qabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah, tentu hal ini dilarang sebab ijab qabul sebagian rukun jual beli. Tetapi sebagian Syafi'iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni meskipun tanpa ijab qabul terlebih dahulu.<sup>41</sup>

#### 4. Jual Beli yang Dilarang

Jual beli dikategorikan sebagai jual beli yang batal apabila sebagian atau keseluruhan rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak kecil dan orang gila, atau barang yang dijual adalah barang-barang yang memang diharamkan *syara'*, seperti darah, babi,

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. 78.

khamar, dan bangkai.<sup>42</sup> Apabila hukum jual beli tersebut adalah batal, maka pelaksanaan transaksi jual beli tersebut juga dilarang.

Jenis-jenis jual beli yang dilarang adalah:

a. Jual beli yang dilarang karena *ahliah* atau subjek jual beli atau ahli akad (penjual dan pembeli), antara lain:

1) Jual beli orang gila

Maksudnya adalah jual beli yang dilakukan oleh orang gila merupakan jual beli yang tidak sah. Hal ini sama dengan jual beli yang dilakukan oleh orang yang berada dalam kondisi mabuk, karena orang mabuk dianggap sedang kehilangan akalunya. Sehingga jual beli yang dilakukan tidak sah.<sup>43</sup>

2) Jual beli yang dilakukan anak kecil

Maksudnya adalah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil (belum *mumazzis*) dipandang tidak sah, karena salah satu syarat sebagai subjek jual beli adalah baligh. namun anak kecil diperbolehkan melakukan jual beli tetapi dalam perkara-perkara ringan.<sup>44</sup>

3) Jual beli orang buta

Jual beli yang dilakukan oleh orang buta tanpa diterangkan sifat objek yang diperjualbelikan dipandang tidak sah oleh Jumhur Ulama, karena ia dianggap tidak bisa membedakan

---

<sup>42</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, h. 171.

<sup>43</sup> A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, h. 111.

<sup>44</sup> *Ibid.*

barang yang bagus dan yang jelek, bahkan menurut ulama Syafi'iyah walaupun sudah diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.<sup>45</sup>

4) Jual beli *Fudhlul*

Yaitu jual beli benda milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Kebanyakan ulama menganggap jual beli seperti itu tidak sah karena dianggap telah merebut hak orang lain (mencuri).<sup>46</sup>

5) Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh, atau pemboros)

Maksudnya ialah jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena ia sedang sakit maupun karena kebodohnya dianggap tidak sah, karena ia tidak punya kepandaian dalam mengendalikan dirinya dan ucapannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>47</sup>

6) Jual beli *Malja'*

Yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang berada dalam kondisi bahaya. Menurut kebanyakan ulama jual beli yang seperti ini tidak sah, karena dipandang dalam keadaan tidak normal atau berada di bawah keterpaksaan bukan pada situasi dan kondisi normal.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*, h. 112.

<sup>48</sup> *Ibid.*



- b. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjualbelikan), antara lain:

1) Jual beli *Gharar*

Yaitu jual beli barang yang mengandung unsur kesamaran. Jual beli yang demikian tidak sah.<sup>49</sup> Secara bahasa *gharar* adalah “hal yang tidak dapat diketahui atau adanya bahaya tertentu”. Menurut istilah fikih, *gharar* didefinisikan sebagai “hal yang tidak diketahui dalam jual beli, atau ketidakjelasan baik dan buruk dari segi sifat ataupun ukuran dari objek transaksi. Contohnya seperti jual beli binatang yang masih dalam kandungan dan mutiara yang berada di laut.<sup>50</sup> Jual beli *gharar* dilarang karena terdapat unsur penipuan yang dapat menimbulkan konflik atau permasalahan di kemudian hari.

2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Maksud jual beli barang yang tidak dapat diserahkan adalah seperti memperjualbelikan burung yang ada di udara dan ikan yang ada di lautan. Hal seperti itu dianggap tidak sah, karena tidak ada kejelasan.<sup>51</sup>

3) Jual beli *Majhul*

jual beli barang yang belum jelas, misalnya jual beli buahan-buahan yang masih di pohon dalam bentuk bunga juga

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash-Ashawi, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 308.

<sup>51</sup> A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, h. 113.

jual beli singkong yang belum dicabut dalam tanah. Menurut jumhur ulama, jual beli seperti ini tidak sah karena bisa mendatangkan perselisihan antarmanusia.<sup>52</sup>

4) Jual beli sperma binatang

Maksudnya adalah jual beli sperma (mani) binatang misal mengawinkan sapi jantan dengan betina untuk tujuan memperoleh keturunan yang baik adalah haram. Hal ini sebagaimana sabda Nabi: “Dari Ibnu Umar RA berkata: Rasulullah SAW telah melarang menjual sperma (mani) binatang”.<sup>53</sup>

5) Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama (Al Quran)

Maksudnya adalah jual beli barang-barang yang sudah jelas keharaman zatnya dalam Al Quran adalah haram.<sup>54</sup>

6) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya

Memperjual belikan barang seperti itu hukumnya adalah haram karena barangnya belum ada dan belum jelas akan seperti apa nantinya.<sup>55</sup>

7) Jual beli *Muzabanah*

Yaitu kegiatan jual beli buah yang basah dengan buah yang kering, misalnya padi yang kering yang dijual dengan bayaran padi yang basah, meskipun dengan ukuran berat yang

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid.*, h. 114.

<sup>55</sup> *Ibid.*, h. 114.

sama tetap akan merugikan pemilik padi kering. Sehingga jual beli ini tidak sah.<sup>56</sup>

8) Jual beli *Muhaqallah*

Adalah jual beli hasil perkebunan yang masih berada di sawah atau ladang. Praktik jual beli seperti ini tanam-tanaman yang masih di ladang atau kebun atau sawah. Jual beli seperti ini mengandung unsur riba di dalamnya (siapa yang beruntung dia yang untung), sehingga dilarang oleh agama.<sup>57</sup>

9) Jual beli *Muhkadharah*

Yaitu jual beli buah-buahan yang belum kelihatan bentuk aslinya atau belum pantas untuk dipanen, misalnya kelengkeng yang masih bentuk bunga, mangga yang masih *kruntil* (kecil) dan lain sebagainya. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, sebab barang tersebut mengandung kesamaran (belum jelas), karena bisa saja buah tersebut rontok dan jatuh sebelum waktu panen tiba sehingga bisa mengakibatkan kerugian untuk salah satu pihaknya.<sup>58</sup>

10) Jual beli *Mulammash*

Yaitu jual beli yang terjadi secara sentuhan, misalnya seseorang yang hanya menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki (memakai), maka berarti ia telah dianggap harus membeli kain itu. Agama melarang jual beli yang seperti ini

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid.*, h. 115.

<sup>58</sup> *Ibid.*

karena mengandung unsur tipuan yang kemungkinan dapat merugikan salah satu pihak.<sup>59</sup>

#### 11) Jual beli *Munabadzah*

Yaitu jual beli yang terjadi secara lempar-melempar, misalnya seseorang berkata: lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula apa yang ada padaku, setelah lempar melempar terjadi, maka itulah kesepakatan jual belinya. Karena terdapat kemungkinan besar unsur penipuan dan merugikan untuk salah satu pihak atau bahkan keduanya, maka jual beli seperti ini dilarang oleh agama.<sup>60</sup>

#### c. Jual beli yang dilarang karena *lafadz* (ijab qabul), antara lain:

##### 1) Jual beli *Mu'atha*

Yaitu jual beli yang telah disepakati oleh para pihak baik yang berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak melaksanakan ijab qabul. Jual beli yang tidak memakai ijab qabul dipandang tidak sah karena tidak terpenuhinya rukun jual beli itu sendiri.<sup>61</sup>

##### 2) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul

Maksudnya adalah bahwa jual beli yang terjadi tidak sesuai antara perjanjian awal ijab dari pihak penjual dengan qabul dari pihak pembeli, karena ada kemungkinan untuk

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> *Ibid.*, h. 116.

meninggikan harga atau menurunkan kualitas barang, sehingga dipandang tidak sah.<sup>62</sup>

3) Jual beli *Munjiz*

Yaitu Yaitu jual beli yang ditangguhkan dengan syarat dan kondisi tertentu. Karena dianggap melanggar rukun dan syarat jual beli, maka jual beli ini dipandang tidak sah.<sup>63</sup>

4) Jual beli *Najasyi*

Yaitu Yaitu jual beli yang dilakukan dengan memengaruhi orang agar mau membeli barang dengan cara menambah atau melebihi harga temannya. Karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri) maka jual beli ini dianggap tidak sah.<sup>64</sup>

5) Menjual di atas penjualan orang lain

Maksudnya adalah seorang penjual menawarkan barang dagangannya dengan cara menurunkan harga, sehingga membuat orang lain berpindah pembeliannya. Misalnya seorang penjual berkata, belilah daganganku ini, akan kuberikan harga yang jauh lebih murah, kembalikan saja barangmu ke toko itu. Persaingan seperti itu merupakan persainagn yang tidak sehat, sehingga agama melarang jenis jual beli seperti itu.<sup>65</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> *Ibid.*, h. 117.



6) Jual beli di bawah harga pasar

Maksudnya adalah jual beli yang dilakukan dengan harga di bawah pasar, dengan menemui petani langsung dari sawah, atau dari pabrik secara langsung sebelum produsen mengetahui harga yang berlaku di pasaran, lalu menjual dengan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Jual beli seperti ini kurang baik dilakukan karena merugikan produsen atau petani.<sup>66</sup>

7) Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain

Contoh dari jual beli ini adalah seseorang berkata: jangan engkau terima penawaran orang itu, aku nanti akan membeli barangmu dengan harga yang lebih tinggi. Penawaran kedua dilakukan di atas penawaran yang pertama. Jual beli ini dapat mendtanakkan perselisihan antara penjual dan pembeli, sehingga agama melarang jual beli dengan cara seperti ini.<sup>67</sup>

## 5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Pada dasarnya manusia melakukan kegiatan jual beli adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak dapat dipenuhi oleh dirinya sendiri. Manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup berdampingan dan membutuhkan orang lain, serta membutuhkan apa saja yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain. Salah satu jalan yang diperbolehkan untuk memiliki sesuatu milik orang lain secara sah adalah melalui perdagangan

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> *Ibid.*, h. 118.

atau jual beli.<sup>68</sup> Manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain:

- a. Penjual dan pembeli merasa puas dan berlapang dada karena jual beli terjadi karena dasar suka sama suka.<sup>69</sup>
- b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta dengan cara yang *bathil*.<sup>70</sup>
- c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal.<sup>71</sup>
- d. Memenuhi hajat hidup orang banyak.<sup>72</sup>
- e. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan *ridha*.<sup>73</sup>
- f. Menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.<sup>74</sup>
- g. Praktik jual beli yang dilakukan dengan baik, etis, adil atau *fair* akan ikut mewujudkan keadilan dalam masyarakat.<sup>75</sup>

## 6. Kaidah Fiqh Mu'amalah

Ekonomi berhubungan dengan materi, namun kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya didasarkan pada nilai materi, tetapi juga dapat disandarkan pada nilai-nilai keagamaan, sehingga juga dapat bernilai

---

<sup>68</sup> Syamsul Effendi, "Jual Beli dengan Sistem Transfer Dana Melalui Bank dalam Pandangan Islam", *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 4 No. 3 (November, 2017), h. 71.

<sup>69</sup> *Ibid.*, h. 121.

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> *Ibid.*, h. 122.

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Alquran*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 45.

ibadah. Islam juga telah memberikan pedoman berupa dalam melakukan kegiatan muamalah, diantaranya yaitu:<sup>76</sup>

- a. Hukum asal dalam muamalah adalah *mubah* (diperbolehkan)

Ulama fiqih sepakat bahwa pada dasarnya segala hukum asal dalam transaksi muamalah adalah *mubah* (diperbolehkan) selama tidak ada *nash* yang melarangnya.

أَلَا صَلُّ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

*“Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil (yang melarangnya)”<sup>77</sup>*

- b. Muamalah dilakukan tanpa adanya unsur paksaan, atas dasar sukarela.
- c. Muamalah dijalankan atas dasar konsep untuk mewujudkan kemaslahatan (manfaat) masyarakat dan menghindari madharat.

Dalam kaidah ilmu fiqih, dijelaskan pula bahwa:

الضَّرَرُ يُزَالُ.

*“Kemadharatan itu harus dihilangkan”<sup>78</sup>*

- d. Muamalah dilakukan dengan menegakkan keadilan, menghindarkan diri dari unsur penganiayaan, serta pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

<sup>76</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 1516.

<sup>77</sup> A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Pernada Media, 2007), h. 10.

<sup>78</sup> Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h. 9.

## 7. Prinsip-Prinsip dalam Berbisnis

Apabila seseorang ingin memulai bisnis, maka hal yang harus diketahuinya terlebih dahulu adalah paham dengan baik hukum agama yang mengatur perdagangan agar ia tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, yang merugikan masyarakat, dan sesuatu yang haram. Seorang muslim dalam bekerja maupun berbisnis diwajibkan untuk paham mengenai bagaimana bertransaksi yang baik dan benar agar tidak terjebak dalam sesuatu yang haram dikarenakan alasan ketidaktahuan. Oleh karena itu, Islam mengajarkan melalui etika bisnis mengiringi kehidupan bisnis masyarakat yang bergelut di dalamnya.<sup>79</sup>

Pada dasarnya, etika mempengaruhi para pelaku bisnis, baik dalam hal kepribadian, tindakan, maupun perilaku.<sup>80</sup> Etika adalah ilmu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk serta tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).<sup>81</sup> Sedangkan etika dalam bisnis atau yang biasa disebut etika bisnis adalah tata cara pengaturan dan pengelolaan bisnis yang ideal dengan memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku.<sup>82</sup>

---

<sup>79</sup> *Ibid.*, h. 1.

<sup>80</sup> Husain Syahatah dan Siddiq Muhammad Al-Amin Adh-Dhahir, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam (Business Ethic in Islam & Al-Gharar fi Al-'Uqud wa Atsaruhu fi At-Tathbiqat Al-Mu'ashirah)* Penerjemah Saptomo Budi Satryo Fauziah R., Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005, h. 55 dikutip oleh A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Alquran*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 47.

<sup>81</sup> Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa", h. 725

<sup>82</sup> *Ibid.*

Terdapat lima aksioma etika bisnis, yaitu:

a. Prinsip Kesatuan/Tauhid/Keesaan

Tauhid merupakan wacana teologis yang menjadi dasar segala aktivitas manusia, termasuk praktik bisnis. Tauhid menyadarkan manusia sebagai makhluk *ilahiyyah*, sosok makhluk bertuhan. Dengan demikian, kegiatan bisnis merupakan dalam rangka menjalankan titah Tuhan sehingga tidak lepas dari pengawasan Tuhan.<sup>83</sup>

Konsep keesaan/ketauhidan menggabungkan sifat homogen semua aspek yang berbeda-beda dalam kehidupan seorang muslim menjadi satu. Konsep tauhid merupakan dimensi vertikal Islam sekaligus horizontal yang memadukan segi politik, sosial ekonomi kehidupan manusia menjadi kebulatan yang homogen yang konsisten dari dalam dan luar sekaligus terpadu dengan alam luas.<sup>84</sup>

Konsep keesaan memiliki pengaruh yang paling mendalam terhadap diri seorang muslim:<sup>85</sup>

- 1) Segala yang ada di dunia ini adalah milik Allah.
- 2) Sebagai Yang Maha Kuasa, Allah dapat dengan mudah mengambil sesuatu atau memberikan sesuatu kepada hamba-Nya.
- 3) Allah yang memiliki kehendak untuk mencabut nyawa seseorang sesuai waktu yang telah ditakdirkan.

---

<sup>83</sup> Khoiruddin, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2015), h. 54.

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> *Ibid.*

- 4) Allah Maha Mengetahui segala sesuatu yang terlihat maupun tersembunyi.

Penerapan konsep keesaan dalam etika bisnis yaitu:<sup>86</sup>

- 1) Akan bertindak adil terhadap para pekerja dan sega apihak yang berkaitan dengan bisnisnya tanpa memandang suku, agama, maupun ras.
- 2) Tidak akan menghalalkan segala cara untuk melanggengkan bisnisnya.
- 3) Mengingat bahwa harta dunia adalah titipan sementara, maka seorang pelaku bisnis tidak akan menimbun kekayaan dan menjauhi sifat serakah.

b. Prinsip Keadilan/Keseimbangan

Ada dua kata yang digunakan Al Quran dalam hal yang berkenaan dengan masalah keadilan, yaitu *al-adl* dan *al-qisth*. *Nash-nash* Al Quran yang menyebutkan keadilan, bukan hanya sekedar anjuran, namun berbentuk perintah yang bersifat mutlak tanpa ikatan waktu, tempat, atau individu tertentu.<sup>87</sup>

Keadilan atau keseimbangan, berarti bahwa perilaku bisnis harus adil atau seimbang. Keseimbangan berarti tidak berlebihan (ekstrem) dalam mengejar keuntungan ekonomi. Kepemilikan individu yang tidak terbatas, sebagaimana dalam sistem kapitalis,

---

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Alquran*, h. 75-76.



tidak dibenarkan.<sup>88</sup> Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tidak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta, dan hak Allah serta Rasulnya berlaku sebagai *stakeholder* dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariah).<sup>89</sup>

Keadilan dan keseimbangan (*equilibrium*) menggambarkan hubungan horizontal ajaran Islam dengan keseluruhan hubungan yang ada yakni dengan alam semesta.<sup>90</sup> Sifat keadilan atau keseimbangan bukan karakteristik yang didapatkan secara alami, melainkan karakteristik yang harus diperjuangkan karena sifatnya yang dinamsi dalam kehidupan.<sup>91</sup> Keadilan yang ditunjukkan Islam adalah keadilan mutlak dan sempurna bukan keadilan yang relatif dan parsial.<sup>92</sup> Islam tidak menghancurkan kebebasan individu, tetapi mengontrolnya demi kepentingan masyarakat yang terdiri dari individu itu sendiri dan karenanya juga melindungi kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, bukan sebaliknya. Individu diperbolehkan mengembangkan hak pribadinya dengan syarat tidak mengganggu kepentingan masyarakat.<sup>93</sup> Penerapan konsep

---

<sup>88</sup> *Ibid.*, h. 55.

<sup>89</sup> Faisal Badroen, et al. *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Prenadamedia, 2015), h. 91.

<sup>90</sup> Koiruddin, *Etika Bisnis Islam*, h. 55.

<sup>91</sup> *Ibid.*

<sup>92</sup> *Ibid.*, h. 56.

<sup>93</sup> *Ibid.*, h. 57.

keseimbangan dalam etika bisnis, adalah dimana Allah memperingatkan pengusaha muslim untuk menyempurnakan takaran dan timbangan dengan neraca yang benar.<sup>94</sup> Firman Allah: *“Semprnakanlah takaranmu apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar: itulah yang lebih utama dan lebih baik akibatnya.”* (QS. Al-Isra’ [17]: 35).

Selain hal tersebut di atas, penerapan keseimbangan dalam etika bisnis yang lain adalah transaksi dalam bisnis harus seimbang, yaitu transaksi yang setara dan adil. Mengekang sikap serakah untuk memiliki barang-barang.<sup>95</sup>

Pada setiap hal keadian memang harus ditegakkan, terutama dalam bidang transaksi bisnis sehingga tidak merugikan pihak lain. Seorang pebisnis juga tidak diizinkan untuk menimbang atau menakar suatu hal dengan dua timbangan yang berbeda, yaitu menyediakan timbangan hanya untuk membeli dan satu timbangan lagi hanya untuk menjual. Hal demikian tidak diperkenankan oleh agama karena dikhawatirkan juga akan menimbulkan kecurangan.<sup>96</sup>

c. Prinsip Kebenaran: Kebajikan dan Kejujuran

Kebajikan adalah sikap ihsan, merupakan tindakan yang memberikan keuntungan bagi orang lain. Dalam pandangan Islam sikap ini sangat dianjurkan, sedangkan kejujuran dipandang sebagai

---

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> *Ibid.*

<sup>96</sup> A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Alquran*, h. 82.

suatu nilai yang paling unggul dan harus dimiliki oleh seluruh masyarakat karena menjadi corak nilai manusia yang berakal.<sup>97</sup>

Sejenak terdengar sedikit aneh apabila kejujuran menjadi salah satu prinsip dalam etika bisnis, karena adanya mitos bahwa kegiatan bisnis adalah kegiatan tipu menipu untuk tujuan mendapatkan keuntungan. Namun kini, para pelaku bisnis modern sadar bahwadan mengakui bahwa kejujuran adalah pemegang kunci keberhasilan dalam kelanggengan bisnis yang dijalaninya. Terdapat tiga lingkup jujur dalam bisnis yang dapat menunjukkan bahwa bisnis tidak dapat bertahan tanpa didasari kejujuran. Pertama, kejujuran saling berkaitan dalam hal pemenuhan kontrak dan syarat-syarat perjanjian yang apabila diterapkan maka akan menimbulkan rasa saling percaya. Kedua, kejujuran juga berkaitan dengan penawaran barang dan/jasa dengan harga dan mutu yang seimbang. Apabila sekali saja konsumen merasa tertipu dengan barang yang dibeli atau jasa yang dipakainya, maka ia tidak akan mengulangi untuk menggunakannya lagi. Ketiga, kejujuran berkaitan dan saling berhubungan dengan hubungan kerja dalam lingkup *intern* perusahaan. Rasa saing percaya antara bos dan karyawan akan menjadi kekuatan yang membangun bagi sebuah perusahaan.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> *Ibid.*, h. 58.

<sup>98</sup> Sonny Keraf, *Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), h. 77-78.

Penerapan konsep kebajikan dalam Etika Bisnis, yaitu:

- 1) Jika seseorang membutuhkan sesuatu, maka orang lain harus memberikannya, dengan mengambil keuntungan yang sedikit mungkin. Jika sang pemberi melupakan keuntungannya, maka hal tersebut akan lebih baik baginya.<sup>99</sup>
- 2) Jika seseorang membeli sesuatu dari orang miskin, akan lebih baik baginya untuk kehilangan sedikit uang dengan membayarnya lebih dari harga yang sebenarnya. Tindakan yang seperti ini akan memberikan akibat yang mulia, dan tindakan yang sebaliknya cenderung akan memberikan hasil yang juga berlawanan.<sup>100</sup>
- 3) Dalam hal mengabulkan hak pembayaran dan pinjaman, seseorang harus bertindak secara bijaksana dengan memberi waktu yang lebih banyak kepada sang peminjam untuk membayar hutangnya, dan jika diperlukan, seseorang harus membuat pengurangan pinjaman untuk meringankan beban sang peminjam.<sup>101</sup>
- 4) Sudah sepantasnya bahwa mereka yang ingin mengembalikan barang-barang yang telah dibeli seharusnya diperbolehkan untuk melakukannya demi kebajikan.<sup>102</sup>

---

<sup>99</sup> A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Alquran*, h. 59.

<sup>100</sup> *Ibid.*, h. 60.

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> *Ibid.*

- 5) Merupakan tindakan yang sangat baik bagi sang peminjam jika mereka membayar hutangnya tanpa harus terus diminta, dan jika mungkin jauh-jauh hari sebelum jatuh waktu pembayarannya.<sup>103</sup>
- 6) Ketika menjual barang secara kredit seseorang harus cukup bersabar diri dengan tidak melakukan tindak kekerasan apabila orang tidak mampu membayar tepat waktu.<sup>104</sup>

d. Prinsip Kehendak Bebas/Kebebasan

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak ada batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.<sup>105</sup>

Kebebasan berarti bahwa manusia sebagai individu dan kolektif punya kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis. Dalam ekonomi, manusia bebas mengimplementasikan kaidah-kaidah Islam. Karena masalah ekonomi, termasuk kepada aspek mu'amalah, bukan ibadah, maka berlaku padanya kaidah umum "Semua boleh kecuali yang dilarang". Yang tidak boleh dalam Islam adalah ketidaadilan dan riba. Dalam tataran ini kebebasan manusia sesungguhnya tidak mutlak, tetapi merupakan kebebasan yang bertanggung jawab dan berkeadilan.<sup>106</sup> Manusia sebagai khalifah

---

<sup>103</sup> *Ibid.*

<sup>104</sup> *Ibid.*

<sup>105</sup> Faisal Badroen, et al. *Etika Bisnis dalam Islam*, h. 96.

<sup>106</sup> Koiruddin, *Etika Bisnis dalam Islam*, h. 60-61.

telah dianugerahi kebebasan (*free will*) ata kehendak bebas untuk membimbing kehidupannya. Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini etika bisnis dalam Islam memiliki kebebasan dalam menjalankan bisnis dari perjanjian yang telah dibuatnya. Namun seorang muslim yang memiliki kepercayaan terhadap Tuhannya akan menjalankan segala perjanjian yang telah ia buat.<sup>107</sup>

e. Prinsip Tanggung Jawab

Pertanggungjawaban bermakna, bahwa manusia yang merupakan subjek bisnis, mempunyai tanggung jawab moral atas tindakan bisnis yang dilakukannya kepada Tuhan. Harta yang menjadi komoditi bisnis dalam Islam, merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.<sup>108</sup> Tidak ada kebebasan apapun yang terjadi tanpa batasan, pasti akan menuntut adanya pertanggung jawaban. Untuk memenuhi kebenaran, kehendak bebas, dan keadilan maka perlu adanya pertanggungjawaban dalam setiap tindakan. Secara logis, aksioma pertanggungjawaban sangat berkaitan erat dengan aksioma kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan tidak lupa untuk bertanggung jawab atas semua yang telah dilakukan.<sup>109</sup>

Secara khusus dalam dunia bisnis. Tanggung jawab moral yang diharapkan dari pelaku bisnis mempunyai dua arah. Yang

---

<sup>107</sup> *Ibid.*, h. 61.

<sup>108</sup> *Ibid.*, h. 62.

<sup>109</sup> *Ibid.*



paling pokok adalah adalah tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, dan kedua, tanggung jawab moral juga tertuju kepada semua pihak yang terkait dengan kepentingan bisnis itu sendiri, baik konsumen, investor, karyawan, maupun masyarakat luas.<sup>110</sup>

Penerapan tanggung jawab dalam etika bisnis, yaitu *pertama* pengusaha yang berperilaku tidak etis tidak menyalahkan karena persoalan bisnis atau karena setiap orang juga berperilaku tidak etis. *Kedua*, pelaku bisnis harus bertanggungjawab atas tindakannya. *Ketiga*, semua kewajiban harus dihargai, kecuali jika secara moral salah, menepati perjanjian bisnis yang sah.<sup>111</sup>

## B. Kajian Pustaka

Sebelum penelitian ini dilakukan, ada beberapa penelitian serupa yang pernah dilakukan mengenai jual beli kelapa sawit diantaranya yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Hayatul Ichsan yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Penimbangan dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat) ditebitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2019 yang didalamnya membahas fokus pada sistem timbangan yang dilakukan sepihak serta praktik penggenapan angka timbangan yang mengakibatkan ketidakjelasan terhadap timbangan.”<sup>112</sup>

---

<sup>110</sup> Sonny Keraf, *Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya*, h. 70.

<sup>111</sup> *Ibid.*, h. 62-63.

<sup>112</sup> Hayatul Ichsan, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Penimbangan dalam Jual Beli Kelapa Sawit”. (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2019), h. 7.

Penelitian selanjutnya adalah skripsi yang ditulis oleh Deni Ariska berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Jual Beli Kelapa (Studi di Desa Marang, Pesisir Selatan) diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di dalamnya fokus membahas jual beli kelapa tiga dihitung dua yang dilakukan sebagai kebiasaan dan di dasarkan oleh ukuran kepalan tangan orang yang akan membelinya.

Skripsi yang ditulis oleh Miftahun Fadhilah berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Kelapa Sawit Sistem Kebersamaan” (Studi di Kelompok Tani Karya Makmur Desa Sumbusari, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan) yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Purwoerto tahun 2018 fokus pada pembahasan sistem kebersamaan yang digunakan pada praktik jual beli dan pengelolaan kebun kelapa sawit di Koperasi Tani Karya Makmur.<sup>113</sup>

Judul penelitian yang peneliti kaji kali ini yaitu “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kelapa Sawit Hitung Tandan” (Studi pada Koperasi Unit Desa Citra Sawit Mandiri Desa Sumber Deras, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir) akan fokus untuk membahas pada jual beli kelapa sawit yang dilakukan berdasarkan hitung tandan tidak didasarkan pada timbangan dari berat buah kelapa sawit yang dipanen.

Semua penelitian di atas hanya fokus membahas pada sistem dan tata cara jual beli, tidak ada yang membahas sistem hitung tandan yang akan dibahas peneliti pada penelitian yang akan dilakukan kali ini.

---

<sup>113</sup> Miftahul Fadhilah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Kelapa Sawit Sistem Kebersamaan”. (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Purwokerto, 2018), h. 6.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media, 2007.
- A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Alquran*, Jakarta: Amzah, 2013.
- A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, Bandar Lampung: Permatanet, 2016.
- Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash-Ashawi, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*”, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Jakarta: Rajagrafindo, 2014.
- Faisal Badroen, et al. *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Prenadamedia, 2015.
- Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajagrafindo, 2018.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajagrafindo, 2016.
- Khoiruddin, *Etika Bisnis dalam Islam*, Bandar Lampung: Permatanet, 2015.
- Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajagrafindo, 2015.

Mardani, *Sistem Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajagrafindo, 2015.

Muhammad Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Rajagrafindo, 2016.

Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Sonny Keraf, *Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius, 2006.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.

## **Jurnal**

Efa Rodiah Nur, Riba dan *Gharar*: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern, *Jurnal Al-Adalah* Vol. 12 No. 3, Juni, 2015.

Eka Nuraini Rachmawati, Ab Mumin bin Ab Ghani, Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12 No. 4, Desember, 2015.

Siti Khasinah, "Hakikat Manusia Menurut Pandangan Islam dan Barat", *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA*, Vol. 13 No. 2 Februari, 2013.

Sri Nawatmi, Etika Bisnis dalam Perspektif Islam, *Jurnal Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi* Vol. 9, no. 1, April 2010.

Syamsul Effendi, "Jual Beli dengan Sistem Transfer Dana Melalui Bank dalam Pandangan Islam", *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 4 No. 3 November, 2017.

Trisdayana Aryadhe, Alit Suryani, dan Ida Bagus Sudiksa, “Pengaruh Sikap dan Norma Subjektif terhadap Niat Beli dan Keputusan Pembelian”, *E-Jurnal Manajemen Unud* Vol. 7 No. 3 Januari 2018.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

### **Wawancara**

Boy Pamungkas, wawancara dengan penulis, pemilik kebun kelapa sawit, Desa Sumber Deras, 14 Desember 2019.

Dadut Taryono, wawancara dengan penulis, Ketua Koperasi Unit Desa Citra Sawit Mandiri, Desa Sumber Deras, 17 Desember 2019.

Ema, wawancara dengan penulis, pemilik kebun kelapa sawit, Desa Sumber Deras, 15 Desember 2019.

Irmawan, wawancara dengan penulis, pemilik kebun kelapa sawit, Desa Sumber Deras, 15 Desember 2019.

Jono Supriyadi, wawancara dengan penulis, Bendahara Koperasi Unit Desa Citra Sawit Mandiri, Desa Sumber Deras, 17 Desember 2019.

Suhari, wawancara dengan penulis, Sekretaris Koperasi Unit Desa Citra Sawit Mandiri, Desa Sumber Deras, 17 Desember 2019.

Zaitun, wawancara dengan penulis, rekaman kaset, Bandar Lampung, 06 Mei 2019.